

# **PIDATO KENEGARAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**S O E H A R T O**

DI DEPAN SIDANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
16 AGUSTUS 1979

(PIDATO DAN LAMPIRAN)

**DEPARTEMEN PENERANGAN RI**





*Presiden Republik Indonesia  
Soeharto*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang saya hormati;  
Para hadirin dan Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air yang berbahagia;

Besok pagi, tanggal 17 Agustus, kita memperingati hari yang paling bersejarah dalam kehidupan bangsa kita. Pada tanggal itu tigapuluh empat tahun yang lalu terjadilah peristiwa sejarah yang besar, yang menentukan jalan dan perkembangan kehidupan bangsa kita.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita memproklamasikan Kemerdekaannya, memutuskan belenggu kolonialisme, melepaskan cengkeraman penjajahan. Mulai saat itu Indonesia Merdeka lahir di tengah-tengah masyarakat dunia, masyarakat bangsa-bangsa.

Malam ini, di hadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, saya ingin mengajak kita semua, segenap

golongan dan lapisan bangsa kita, untuk sama-sama tafakur dan merenung sejenak, sambil menelusuri kembali perjalanan dan kehidupan bangsa kita selama tigapuluh empat tahun ini. Lebih dari itu, marilah kita resapi dan kita hayati kembali makna kemerdekaan yang telah kita perjuangkan mati-matian, yang telah kita rebut dan pertahankan dengan segala pengorbanan: pengorbanan benda dan pengorbanan nyawa.

Kemerdekaan Tanah Air! Kemerdekaan Bangsa! Alangkah hebatnya perkataan itu. Di dalamnya terkandung harga diri, harapan dan cita-cita.

Untuk Kemerdekaan Negara ini tak terhitung pahlawan bangsa yang telah mempersembahkan jiwa raganya, gugur sebagai tumbal Kemerdekaan di berbagai medan perjuangan di seluruh persada Tanah Air. Tak sedikit orang tua yang kehilangan putera, harapan masa depannya; tak sedikit wanita yang kehilangan suami, tumpuan kecintaannya; tak sedikit anak-anak yang kehilangan ayah, andalan kehidupannya. Semua mereka yang tiada itu adalah pejuang-pejuang kusuma bangsa.

Sudah pada tempatnya apabila dalam kesempatan seperti ini, kita persembahkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniai Kemerdekaan kepada bangsa kita. Di samping tak lupa kita panjatkan doa kepadaNya, semoga Ia berkenan menerima segala pengorbanan para pejuang bangsa kita, memberikan tempat bahagia bagi mereka yang telah pergi dan memberikan perlindungan bagi mereka yang masih tinggal, agar tetap setia pada cita-cita perjuangan bangsa.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sekarang, tigapuluh empat tahun sudah bangsa kita hidup sebagai bangsa yang merdeka. Tigapuluh empat tahun sudah bangsa kita lepas dari kekuasaan asing. Tigapuluh empat tahun sudah bangsa kita hidup berpemerintahan sendiri. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah puaskah kita

dengan apa yang telah kita capai selama ini? Sudahkah kita menganggap telah tiba waktunya bagi kita untuk hidup beranak-anak?

Jawabnya sudah pasti: Belum! Kita belum puas! Tujuan perjuangan dan cita-cita Kemerdekaan bangsa kita masih belum terjangkau. Masih jauh. Kita masih harus bekerja lebih keras dan lebih tekun dari waktu-waktu yang lalu. Kita masih harus mengejar berbagai ketinggalan dan kekurangan kita di berbagai bidang kehidupan. Kita masih harus prihatin. Kita masih harus "tirakat".

Sesungguhnya Kemerdekaan itu sendiri bukanlah tujuan akhir perjuangan. Karena kita merdeka bukan hanya untuk merdeka. Kita memperjuangkan Kemerdekaan karena kita ingin membangun bangsa kita sendiri. Karena kita ingin menggali, mengolah dan menggunakan kekayaan alam dan Tanah Air kita untuk kebahagiaan seluruh bangsa kita, dan untuk anak cucu kita, generasi yang akan datang.

Kita memang telah mulai membangun. Sekarang kita telah berada pada permulaan REPELITA III. Dan, di dalam REPELITA III ini kita berada di pertengahan jalan untuk meletakkan landasan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi idam-idaman kita semua. GBHN memberi petunjuk kepada kita, bahwa landasan masyarakat adil makmur itu akan dapat kita wujudkan setelah kita melaksanakan 5 — 6 kali REPELITA secara sambung menyambung. Dalam pertengahan jalan sekarang ini kita perlu kembali melihat arah kita : apakah kita telah menuju kepada arah yang benar. Dan kita yakin bahwa arah kita sudah benar. Orde Baru telah mengambil arah perjuangan yang benar setelah mengadakan introspeksi dan koreksi secara tepat dan bijaksana terhadap keadaan sebelumnya. Apabila kita dalam perjalanan pembangunan ini menghadapi berbagai akibat samping, atau hambatan-hambatan yang berat dan kadang-kadang memilukan, marilah kita perbaiki akibat-akibat samping yang tidak kita kehendaki itu dan marilah kita pecahkan bersama dan atasi

bersama hambatan-hambatan itu betapapun sulit dan beratnya, agar kita dapat berjalan tetap lurus, bahkan dapat lebih melancarkan jalannya perjuangan pembangunan ini. Ini adalah wajar; sebab pembangunan suatu bangsa selamanya menghadapi masalah-masalah besar dan tidak terbilang banyaknya masalah-masalah kecil. Segala masalah itu harus kita atasi dan jalannya pembangunan ini harus benar-benar terarah, dan terpadu agar kita tetap menuju arah cita-cita semula.

karena itu, marilah kita pada setiap kesempatan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, selalu merenungkan ulang dan mendalami kembali apa sebenarnya yang kita cita-citakan, ke arah mana kita harus berjalan dan sikap dasar apa yang harus kita tampilkan. Dengan kata lain marilah kita mendalami dan menyadari kembali gagasan-gagasan pokok kita mengenai dasar, tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan bangsa ini. Sudah menjadi kebulatan tekad dan ketetapan seluruh bangsa Indonesia : bahwa Pancasila adalah yang menjadi dasar falsafah dan ideologi negara kita. Itu berarti pula bahwa Pancasila adalah dasar, tujuan dan sekaligus cara kehidupan kita sebagai bangsa. Ini berarti bahwa sikap dasar dan pikiran-pikiran kita dalam bernegara harus merupakan perwujudan cita-cita Pancasila, bahwa cara penyelenggaraan pemerintahan harus menepati norma-norma Pancasila, dan bahwa bentuk dan corak masyarakat yang ingin kita wujudkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Perwujudan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi dalam kehidupan kenegaraan menuntut kita semua untuk membangun tata kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang benar-benar disemangati dan diwarnai oleh semangat kekeluargaan!

Marilah kita ingat baik-baik bahwa alas kekeluargaan ini merupakan ciri dan corak bangsa kita. Ini berarti bahwa dalam pemerintahan dan masyarakat Pancasila kita tidak akan memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme maupun totaliterisme. Penolakan terhadap paham-paham itu dengan jelas telah



dikemukakan oleh pendahulu-pendahulu kita tatkala mereka merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila bukan merupakan hasil perkawinan dari bermacam-macam ideologi yang saling berlawanan. Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan paduan cita-cita yang menjelmakan alam pikiran dan cita hidup bangsa Indonesia secara bulat dan utuh. Pancasila memberi petunjuk kepada kita mengenai kerangka dan pola berpikir kita dalam mewujudkan negara, pemerintahan dan masyarakat yang kita angan-angankan.

Dengan kesadaran bahwa kita adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita adalah sama-sama makhluk manusia yang memiliki martabat dan harkat yang sama, bahwa kita adalah satu bangsa, maka segala kepentingan dan masalah bersama akan kita putuskan dan kita laksanakan bersama sebagai hasil musyawarah dan mufakat yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan tadi.

Cita kekeluargaan membimbing kita agar lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kesenangan sendiri, lebih mengutamakan penunaian kewajiban-kewajiban kemasyarakatan kita daripada penuntutan hak-hak pribadi, dan lebih mengutamakan memadu pendapat melalui musyawarah daripada mengadu kekuatan untuk mencari menang sendiri. Pancasila juga membimbing kita untuk menumbuhkan semangat kerukunan dan keutuhan, semangat persatuan dan kebersamaan, sikap setiakawan dan gotong royong.

Pemahaman kembali atas cita kekeluargaan ini sangat penting agar hal itu tetap membimbing kita semua dalam melanjutkan perjalanan di masa datang. Pembangunan yang kita laksanakan jelas akan mendatangkan perubahan-perubahan besar dan makin cepat di masa-masa datang. Perubahan itu bukan saja menyangkut hal-hal yang bersifat fisik kebendaan, akan tetapi juga menyangkut hal-hal rokhani kejiwaan. Cita kekeluargaan itu bertambah penting kita sadari, karena dengan makin membuka diri, kita juga tidak terlepas dari masuknya gagasan-gagasan dari luar. Misalnya saja

gagasan mengenai kebebasan pribadi dan hak-hak asasi, masalah kritik dan oposisi, masalah mengeluarkan pendapat dan demokrasi.

Tidak jarang, bangsa kita menjadi lelah dan lemah, karena hebatnya perbedaan-perbedaan pendapat di antara kita dalam menanggapi gagasan-gagasan itu. Marilah kita bersikap arif dalam menanggapi gagasan-gagasan yang masuk dari luar tadi. Gagasan-gagasan semacam itu harus kita kaji lebih teliti. Kita tidak boleh menerima begitu saja dan kita tidak akan menolak begitu saja. Gagasan-gagasan tadi datang dari masyarakat lain, yang belum tentu sesuai dengan cita dan semangat kekeluargaan yang kita anut dan akan terus kita kembangkan. Kita mungkin dapat dan kadangkadang perlu mengambil ilham dari pemikiran orang lain untuk memperkaya pemikiran-pemikiran kita sendiri. Tetapi jelas kita tidak boleh memungut dan menelannya begitu saja tanpa kita menyaring dan menilainya dengan saksama, apakah pemikiran-pemikiran itu sesuai atautkah malahan bertentangan dengan alam pikiran dan pola budaya bangsa kita, cita dan asas kekeluargaan. Tanpa menyaring dan menilainya dengan saksama, maka penetran pemikiran dari masyarakat lain ke dalam masyarakat kita jelas berbahaya, karena akan melemahkan dan tidak cocok dengan kepribadian kita sendiri. Juga sangat berbahaya jika kita menggunakan begitu saja pemikiran-pemikiran orang lain justru untuk menilai sistem kenegaraan, politik, pemerintahan dan kemasyarakatan kita.

Karena itu marilah kita tanamkan dalam hati mengenai cita kekeluargaan ini. Dan marilah dengan cita kekeluargaan itu kita beri warna kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang kita bangun.

Dalam membangun tata kehidupan politik yang kita kembangkan adalah Demokrasi Pancasila. Keuniversilan cita-cita demokrasi kita padukan dengan cita hidup bangsa kita yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Justru karena semangat kekeluargaan ini, maka dalam Demokrasi Pancasila itu kita tidak

mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas, sebab konsep mayoritas dan minoritas tidak sesuai dengan asas kekeluargaan.

Karena Pancasila adalah pandangan hidup bangsa kita dan dasar falsafah negara, maka tidak dapat lain semua kekuatan sosial politik harus merupakan pendukung dan pembela Pancasila. Pancasila harus menjadi asas cita-cita, landasan program, pembimbing kegiatan dan tujuan politik kita semua tanpa kecuali.

Kehidupan ekonomi juga harus kita kembangkan di atas asas kekeluargaan seperti yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cara-cara seperti penindasan yang kuat terhadap yang lemah, persaingan yang saling mematikan, penggunaan milik dan kekayaan yang tidak mengenal batas dan yang mengingkari tanggungjawab sosial dan sebagainya, adalah jelas berlawanan dengan asas kekeluargaan. Semua kekuatan ekonomi harus kita bina agar saling menghidupkan demi kesejahteraan bersama. Dalam rangka ini koperasi —sebagai wadah dari golongan ekonomi rakyat yang lemah— harus kita kembangkan sehingga kekuatan ekonomi rakyat sungguh-sungguh menjadi tulang punggung yang kuat bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa kita secara keseluruhan.

Sudah barang tentu, pengembangan tata kehidupan politik dan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan itu, harus didukung oleh dan dalam rangka pengembangan tata sosial dan budaya yang disemangati oleh nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertambah terasa keperluannya, sebab hubungan yang makin luas dengan bangsa-bangsa lain mengharuskan kita untuk membentengi diri agar tidak terpengaruh oleh nilai-nilai sosial dan budaya dari luar yang tidak cocok dengan kepribadian kita.

Mau tidak mau, keadaan di luar pagar Tanah Air kita itu tentu akan mempunyai pengaruh ke dalam diri kita. Karena itu,

marilah kita terus memperkuat ketahanan nasional di segala bidang.

Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat ;

Sekarang kita telah memasuki pelaksanaan REPELITA III, setelah kita dengan selamat menyelesaikan pelaksanaan REPELITA II. Dan kita memang telah menyiapkan diri untuk memikul tugas-tugas kita dalam tahun-tahun mendatang.

Marilah kita lihat kembali sejenak apa yang telah kita kerjakan selama ini, apakah yang telah kita capai sampai sekarang dan apa pula yang harus kita kerjakan di masa datang. Marilah kita ingat kembali pula kerangka pemikiran kita mengenai tahap pembangunan sejak Orde Baru.

Memang, sejak tahun 1966 dahulu kita telah mengambil keputusan bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan, kita perlu meletakkan pembangunan ekonomi pada urutan pertama dari skala prioritas nasional kita. Kita mengambil keputusan yang demikian, sebab terbengkalainya pembangunan ekonomi itu pada masa-masa sebelumnya telah mengakibatkan kemerosotan kehidupan bangsa kita hampir di segala bidang. Dengan mengatakan hal itu, kita tidak ingin menjelek-jelekkan masa lampau. Sebab, bagaimanapun masa lampau itu adalah masa kita juga, bagian dari sejarah pertumbuhan dan suka duka kita sebagai bangsa yang sedang tumbuh. Tetapi juga sangat terang, bahwa kita harus belajar dari sejarah kita sendiri dan juga belajar secara pandai dari sejarah bangsa-bangsa lain.

Sejarah itu dengan jelas mengajarkan kepada kita, bahwa hanya dengan mengutamakan pembangunan ekonomilah kita dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan

sosial yang kita cita-citakan. Tanpa pembangunan ekonomi, kita tidak akan mengalami kemajuan. Tanpa kemajuan kita tidak akan menikmati kesejahteraan dan keadilan. Sebab tanpa kemajuan, keadilan sosial hanya akan berarti meratakan pembagian kemelaratan.

Tetapi juga kita sadari, bahwa kemajuan saja tidak berarti dengan sendirinya mendatangkan keadilan sosial. Karena itulah, sejalan dengan kemajuan pembangunan yang kita capai, maka kitapun terus berusaha pemeratakan pembangunan menuju keadilan sosial tadi. Dalam rangka inilah sangat penting artinya "Delapan Jalur Pemerataan" yang akan kita tempuh bersama-sama dalam REPELITA III sekarang ini. Dan dengan segala kekurangan yang kita sadari, maka pembangunan ekonomi itu kian menunjukkan hasil-hasilnya. Sebab itu, jangan hanya karena masih adanya kekurangan-kekurangan tadi, kita tiba-tiba lalu berobah arah. Marilah kita perbaiki apa yang kurang baik, dan marilah kita lanjutkan dan tingkatkan lagi apa yang sudah kita lakukan dengan baik. Pembangunan adalah pekerjaan besar. Pembangunan meminta perjalanan yang jauh dan waktu lama, sebelum kita tiba pada tujuan dan menikmati jerih payah kita. Karena itu pembangunan juga memerlukan konsistensi strategi.

Kita tetap sadar, bahwa pembangunan yang kita lakukan adalah tetap pembangunan bangsa dalam arti luas. Karena itu, walaupun kita mencurahkan perhatian yang besar terhadap pembangunan ekonomi, namun pembangunan bidang-bidang lain sama sekali tidak kita abaikan. Kita terus melaksanakan pembangunan dibidang politik, kita tetap melakukan pembangunan di bidang ketatanegaraan, kita melanjutkan pembangunan demokrasi, kita menggarap pembangunan budaya, kita terus membangun lapangan hukum, kita terus membangun aparatur, kita terus membangun bidang pertahanan keamanan dan sebagainya. Dan apakah pembangunan bangsa dalam arti luas itu? Di sini saya ingin mengulangi apa yang saya tegaskan sembilan tahun yang lalu. Pembangunan bangsa dalam arti yang luas meliputi pengem-

bangun nilai dasar yang kita anggap vital, menumbuhkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis, mengembangkan bakat dan harkat manusia, memelihara dan mengembangkan lembaga-lembaga dan tata cara yang telah kita pilih untuk hidup bersama berbangsa dan bernegara ini. Dengan kata lain, persoalan pokok pembangunan bangsa kita adalah menumbuhkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, dengan tata cara yang ditunjukkan oleh semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Banyak yang telah kita lakukan dalam membangun lapangan politik, sehingga dinamika masyarakat tetap tumbuh dalam suasana dan gairah yang menjamin kestabilan. Kita pusatkan usaha pada pemantapan pelaksanaan sistem dan kelembagaan politik dan ketatanegaraan kita seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar. Sejak kita membuka era baru mulai tahun 1966 hingga sekarang, maka tekad kita untuk melaksanakan asas dan sendi Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah goyah. Kita terus berusaha melaksanakannya dan makin menyempurnakannya tanpa mengenal lelah. Sungguh kita makin kaya dengan pengalaman, baik pengalaman-pengalaman yang membesarkan hati maupun pengalaman yang seringkali membuat kita risau. Kita terus berusaha untuk mengambil segala pengalaman tadi, kita terus berusaha memahami kekuatan kita dan menyadari kelemahan kita. Dalam bidang politik inipun kita terus berusaha membuat baik apa yang belum baik dan kita juga berusaha untuk menyempurnakan lagi apa yang sudah baik.

Kita bertekad untuk terus menumbuhkan kesadaran hidup berkonstitusi berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Kita berteguh hati untuk melaksanakan sistem politik dan kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sikap dasar ini kita ambil, karena kita percaya, hanya dengan jalan itu kita akan terus tum-

buh menjadi bangsa yang makin dewasa dan kokoh, yang menjamin stabilitas, kontinuitas dan dinamika masyarakat dari generasi ke generasi. Kita yakin akan kebenaran Pancasila dan kita yakin pula bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan yang kokoh serta sistem dan tata cara yang jelas dan luwes dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa seperti yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan keyakinan ini sebenarnya sudah kita tegaskan sejak kita bersama bertekad melaksanakan Orde Baru belasan tahun yang lalu. Adalah suatu kenyataan sejarah, bahwa dalam masa-masa yang sangat sulit, karena adanya konflik situasi pada saat-saat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka jalan keluarnya juga kita tempuh secara demokratis dan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan disemangati oleh Pancasila. Ini sungguh suatu awal yang baik. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa betapapun berat masalah yang kita hadapi, betapapun lebar perbedaan pandangan di antara kita, akan tetapi jika perbedaan-perbedaan itu dapat kita selesaikan secara demokratis dan konstitusional, maka akhirnya kita akan tiba pada akhir penyelesaian yang paling baik.

Dalam pelaksanaan kehidupan yang demokratis konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu, kita boleh berbeda pendapat mengenai satu hal atau banyak hal, kita boleh memperjuangkan sesuatu yang kita anggap baik bagi bangsa dan negara ini, asalkan semuanya itu kita lakukan melalui jalur-jalur dan cara-cara yang ditunjukkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar. Cara-cara yang lain sungguh hanya akan menimbulkan onar dan dapat membahayakan keselamatan bangsa kita.

Untuk menegakkan kehidupan konstitusional itu, selama ini kita telah memiliki lembaga-lembaga tinggi/tertinggi negara, yang semuanya dibentuk dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat fundamental, sebab tanpa itu mustahil kita berbicara tentang tegaknya kehidupan dan sistem konstitusional.

Menegakkan dan membina kehidupan demokrasi dan konstitusional bukan saja berarti memiliki lembaga-lembaga konstitusional, tetapi juga harus didorong agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi secara konstitusional pula, sehingga mekanisme konstitusi itu benar-benar dapat berjalan. Dan selama ini, tidak disangsikan lagi peranan dan hasil-basil karya dari lembaga-lembaga konstitusional itu, —baik lembaga tertinggi MPR, maupun lembaga-lembaga tinggi DPR, DPA, BPK dan Mahkamah Agung dengan semua aparatnya— telah menjalankan peranannya sesuai dan dalam rangka mengisi kehidupan ketatanegaraan berdasarkan konstitusi yang kita sepakati dan terima bersama.

Namun kita juga harus menyadari bahwa mengembangkan kehidupan demokratis konstitusional juga memerlukan proses. Kita terus berusaha memperbaiki segi-segi kelembagaan, pengaturan dan tata caranya. Malahan kita juga harus mengadakan persiapan-persiapan mental dan psikologis. Kita harus memperkokoh ketahanan ideologi agar Pancasila makin kuat berakar dalam hati kita semuanya, dan agar Pancasila tidak disusupi oleh ideologi lain yang tidak cocok dengan kebutuhan dan kepribadian kita sendiri. Kita harus mengembangkan kebudayaan politik yang makin segar, di mana perbedaan pendapat tidak diartikan sebagai adu kekuatan, melainkan adu pendapat untuk memperoleh pandangan bersama mengenai apa yang baik bagi kita semua. Yang kita inginkan adalah wajah kehidupan politik yang cerah dan bergairah, bukan yang suram dan wajah berkerut diliputi ketegangan dan saling tidak percaya.

Di dalam era baru yang kita bangun sejak tahun 1966 —di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945- kita telah dua kali berhasil melaksanakan pemilihan umum. Ini merupakan Puncak-puncak usaha kita untuk menampilkan wajah demokrasi secara lebih nyata. Kita bersyukur bahwa dua kali pemilihan umum yang kita adakan itu telah berlangsung dengan selamat. Walaupun setiap kali menjelang pemilihan umum kita selalu merasakan suhu politik yang meninggi, namun setelah selesainya pemilihan umum



suhu politik kembali mereda. Dan walaupun setiap kali menjelang pemilihan umum timbul perbedaan-perbedaan pandangan yang tajam di antara kita mengenai berbagai program nasional untuk masa depan dan masalah-masalah penting lainnya, namun akhirnya kita dapat menemukan konsensus nasional melalui permufakatan sebagai hasil musyawarah dalam MPR hasil pemilu itu, sehingga dalam sidangnya itu MPR telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, menghasilkan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan-ketetapan penting lainnya, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Semuanya itu menandakan betapa kita terus berusaha mendewasakan kehidupan demokrasi dan berkonstitusi.

Dengan pemilihan umum yang kita adakan lima tahun sekali, kita bukan raja berusaha untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan negara ini berada di tangan Rakyat, tetapi juga untuk menampung dinamika dan pikiran-pikiran baru yang timbul dalam masyarakat kita yang akhirnya akan dituangkan dalam GBHN dan atau produk-produk lainnya oleh MPR hasil pemilihan umum yang bersangkutan.

Dengan menampilkan aspirasi-aspirasi itu secara demokratis konstitusional, terutama melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat --MPR, DPR, DPRD-- yang dipilih melalui pemilihan umum, maka kita dapat terus memberi ruang gerak bagi dinamika masyarakat dengan tetap mempertahankan stabilitas.

Dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan umum tahun-tahun yang akan datang, antara lain, Pemerintah sedang menggodok Rancangan Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Pemilihan Umum yang berlaku sampai sekarang. Dengan perubahan itu kita berharap agar pemilihan umum pada tahun '82 nanti akan lebih baik pelaksanaannya dari apa yang dua kali telah kita lakukan.

Saudara-saudara, Sidang yang mulia;

Dalam mengembangkan dinamika politik dalam suasana sta-

bilitas, kita juga telah dan harus terus memperlancar jalannya komunikasi dua arah yang terbuka dan jujur, baik antara Pemerintah dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan masyarakat sendiri. Komunikasi ini penting untuk menghindarkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, yang tidak jarang terjadi karena putusannya komunikasi ini. Dalam rangka ini peranan pers sangat vital untuk menjadi media komunikator yang cepat, tepat dan proporsional. Komunikasi ini sangat penting untuk mengembangkan kreativitas dan memperluas cakrawala penglihatan masyarakat. Dan hanya melalui komunikasi yang intensiflah maka akan tercapai konsensus-konsensus nasional yang mantap. Hal ini sangat penting sebab masyarakat yang membangun selalu memerlukan gagasan-gagasan Baru yang segar.

Dalam rangka ini peranan lembaga-lembaga perwakilan rakyat –Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah– sangatlah penting. Sesuai dengan semangat dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kita terus berusaha agar melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu rakyat menyalurkan keinginannya dan melaksanakan pengawasannya kepada Pemerintah. Melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat inilah Pemerintah menjelaskan kebijaksanaan yang diambilnya, agar rakyat mengetahui. Sebaliknya, dari wakil-wakil rakyat ini diharapkan agar disebarkan penjelasan yang lebih luas kepada masyarakat yang diwakilinya mengenai berbagai kebijaksanaan Pemerintah yang telah disetujuinya. Dengan tersalurnya aspirasi rakyat itu melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat ini, diharapkan segala aspirasi dan keinginan rakyat dapat tersalur secara tertib. Dan ketertiban ini menjadi salah satu ukuran kematangan kita sebagai bangsa yang merdeka dan mampu mengurus diri sendiri.

Karena itulah tepat satu tahun yang lalu, dari mimbar ini juga saya menekankan, bahwa kita semua wajib memberi bobot dan peranan yang tinggi kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat kita.

Lembaga-lembaga perwakilan rakyat harus dapat menampung dan menyaring suara hati nurani rakyat. Dengan demikian segala aspirasi, keinginan dan harapan-harapannya –juga kekecewaan dan kegelisahannya– dapat ditampung dan disalurkan secara demokratis konstitusional. Dengan demikian, maka usaha-usaha kita dalam menumbuhkan kehidupan demokratis konstitusional, bukan saja menyempurnakan wadahnya melainkan juga isinya, bukan saja memperkokoh sistemnya melainkan juga menghidupkan gerakannya.

Ini adalah tugas kita bersama. Kita memang masih harus membina dan menyempurnakan terus. Kita masih belum puas dengan keadaan dan hasil-hasil kita sekarang.

Kita semua memang masih perlu meningkatkan kesadaran politik, dalam arti kesadaran hidup bersama di dalam perumahan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini peranan semua kekuatan sosial politik sungguh sangat diharapkan. Partai-partai politik, Golongan Karya, Organisasi-organisasi profesi/fungsional, demikian juga ABRI sebagai kekuatan sosial, semuanya mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat.

Dewasa ini kita telah berhasil memiliki dua Partai Politik dan Golongan Karya --sebagai hasil penggabungan dari sejumlah besar organisasi politik dan organisasi massa yang ada waktu itu yang bukan saja hak hidupnya, tetapi juga hak partisipasinya dalam pemilihan umum dijamin dengan undang-undang. Dengan adanya tiga organisasi politik yang sah itu, kita mengharapkan agar pembinaan kehidupan demokrasi Pancasila dikalangan masyarakat dapat terlaksana sebaik-baiknya; semua aspirasi yang hidup dalam masyarakat diharapkan dapat disalurkan melalui atau ditampung oleh organisasi-organisasi politik itu untuk selanjutnya diperjuangkan secara demokratis dan konstitusional.

Demikian juga organisasi profesi/fungsional seperti organisasi pemuda, wanita, buruh, tani, nelayan, guru, ulama, wartawan,

pengusaha, cendekiawan dan sebagainya perlu terus mengadakan konsolidasi, agar makin kokoh dapat mengamalkan profesi dan fungsi di bidangnya masing-masing yang selaras dan serasi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN.

Saya sungguh mengharapkan agar semua organisasi sosial politik, disamping terus mengadakan konsolidasi ke dalam, juga mau dan mampu meningkatkan kesadaran politik rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mampu mengajak dan menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan seperti yang digariskan dalam GBHN.

GBHN adalah hasil putusan rakyat sendiri yang disuarakan melalui wakil-wakilnya dalam Sidang Umum MPR yang lalu, dan karenanya merupakan milik rakyat dan menjadi tanggungjawab kita semua untuk mensukseskan pelaksanaannya.

Demikian pula ABRI kita yang dalam Orde Baru ini telah berhasil menumbuhkan integrasi yang makin mantap dan yang merupakan salah satu kekuatan dan modal dasar perjuangan bangsa dalam setiap tahap perjuangan, harus dapat melaksanakan dwi fungsinya —sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial-sebaik-baiknya dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan dan untuk mengamankan serta memantapkan landasan perjuangan dan dasar negara Pancasila.

Untuk itu ABRI terus tetap berada di tengah-tengah dan manunggal dengan rakyat dan tetap mampu memberikan dinamika dalam mendorong dan meningkatkan kesadaran politik rakyat, kesadaran politik yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu ABRI bersama-sama seluruh kekuatan rakyat yang setia dan teguh kepada dasar falsafah negara Pancasila masih tetap mempunyai tugas untuk mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari bahaya laten sisa-sisa dan unsur-unsur PKI dan atau kekuatan-kekuatan ekstrim anti Pancasila lainnya.

Dengan dibebaskannya para tahanan bekas PKI golongan B dalam beberapa tahun terakhir ini, memang kemungkinan tumbuh-

nya kerawanan dalam masyarakat meningkat. Karenanya kita semua perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan negatif dari bekas tahanan tersebut. Saya mengharapkan kepada para bekas tahanan yang telah diberi kesempatan untuk memasyarakat kembali itu, mau belajar dari pengalaman kesesatan mereka di waktu yang lalu dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh Orde Baru, kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun apabila ternyata ada yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah itu dan mencoba menghidup-hidupkan lagi aspirasi PKI dan menimbulkan keonaran dalam masyarakat, maka alat-alat keamanan pasti tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Dewasa ini keadaan keamanan di seluruh wilayah tanah air kita cukup baik. Usaha memelihara stabilitas keamanan dan pemantapan ketertiban masyarakat yang juga merupakan tugas pokok ABRI perlu dikembangkan dengan kebijaksanaan dan pendekatan yang dilandasi oleh wawasan yang tajam dan tepat, serta daya tangkal yang tinggi terhadap segala ancaman dan gangguan. Di samping itu juga harus dilengkapi dengan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Karena itu usaha memantapkan stabilitas keamanan tidak boleh menimbulkan kesan negatif di mata masyarakat kita yang umumnya masih sederhana cara berpikirnya. Stabilitas keamanan yang ingin kita kembangkan bukanlah stabilitas semu di atas permukaan; melainkan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupannya yang wajar. Rakyat harus tetap merasa gairah dalam kehidupannya dan ikut ambil bagian dalam pembangunan. Yang ingin kita wujudkan adalah keamanan sejati. Ialah: suatu sikap batin, suatu kepercayaan yang timbul dari perasaan bahwa ancaman fisik, sosial dan mental telah dapat dikendalikan sebaik-baiknya, dikaitkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat kita.

Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat;

Untuk mengamankan dan melestarikan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Pancasila, kita telah memiliki Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Dan sebagai Mandataris MPR, Presiden ditugaskan untuk mengusahakan pelaksanaannya sebaik-baiknya. Dalam rangka itu dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan kesadaran politik rakyat yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka telah dimulailah penataran-penataran P4, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Dewasa ini penataran itu dilakukan sebagian besar dilingkungan pegawai Republik Indonesia di samping juga telah mulai dilaksanakan dilingkungan wartawan, pemuda dan para pemuka agama yang ada di Indonesia. Penataran ini pada saatnya akan juga menjangkau pada segenap lapisan masyarakat. Dan untuk itu Pemerintah telah membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan P4 (disingkat BP7). Diharapkan badan tersebut dalam waktu secepatnya telah dapat mulai bekerja melaksanakan penataran-penataran bagi lingkungan masyarakat luas, agar masyarakat secepatnya mengetahui dan meresapi P4 itu yang sekaligus juga akan dapat meningkatkan kesadaran politiknya yang dijiwai oleh dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara Ketua yang terhormat;

Unsur lain yang kita perhatikan untuk menjamin stabilitas nasional yang dinamis adalah penegakan hukum. Malahan bagi kita, tegaknya hukum ini merupakan tujuan tersendiri dalam kerangka besar usaha bangsa kita untuk melaksanakan semangat dan tujuan Undang-Undang Dasar. Kita terus mengusahakan perbaikan hukum dan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan tuntutan negara merdeka dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Berbagai sarana untuk menunjang tegaknya hukum dan kelancaran penyelesaian hukum juga makin banyak dapat kita siapkan selama REPELITA II dan akan terus dilanjutkan dalam

REPELITA III dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Tata cara penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan persidangan di pengadilan juga terus kita perbaiki dan kita usahakan untuk dipercepat pelaksanaannya. Dewasa ini Pemerintah sedang merampungkan suatu Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merupakan perbaikan dari pada Hukum Acara Pidana yang berlaku sampai sekarang. Dalam Hukum Acara Pidana yang baru nanti diusahakan adanya jaminan hukum dan kepastian hukum yang jelas bagi seseorang yang dikenakan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum. Mudah-mudahan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini secepatnya dapat diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat untuk diadakan pembahasan selanjutnya.

Dalam pada itu adanya dinamika dalam masyarakat juga tampak dalam kebebasan mengeluarkan pendapat dan suara. Apabila akhir-akhir ini ramai orang berkata mengenai adanya keresahan, mengenai tidak adanya jaminan hukum atas kebebasan seseorang —yang umumnya gampang kita baca di surat-surat kabar—, maka sesungguhnya, ucapan-ucapan itu sendiri malahan menunjukkan adanya kebebasan mengeluarkan pikiran. Dan jika karena ucapan atau perbuatan-perbuatan seseorang ditahan untuk dimintai keterangannya, atau diajukan ke depan pengadilan, maka itu tidak berarti kebebasan mengeluarkan pikiran yang dirampas; akan tetapi karena perbuatannya melanggar hukum. Karena kita semua menginginkan tegaknya hukum, maka kita percayakan penilaian dan putusannya kepada para Hakim di pengadilan.

Demikianlah berbagai usaha-usaha pokok yang telah kita lakukan dalam rangka menumbuhkan dan memantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Marilah kita bina terus bersama-sama agar supaya kita dapat makin memantapkan lagi keadaan sosial

politik yang stabil dan dinamis ini berdasarkan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sekarang, bagaimana keadaan sosial ekonomi kita setelah kita menyelesaikan pelaksanaan REPELITA II?

Dalam garis besarnya ada tiga tanda-tanda penting dari keadaan ekonomi kita pada akhir REPELITA II. Ketiga tanda itu adalah :

- Pertama : Kemampuan ekonomi kita bertambah besar;
- Kedua : Peranan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat juga bertambah besar; dan
- Ketiga : Ketahanan ekonomi nasional kita bertambah kokoh.

Mengenai bertambah besarnya kemampuan ekonomi kita dalam REPELITA II, dapat kita lihat pertama-tama dari bertambah besarnya kemampuan penyediaan Anggaran Belanja baik untuk kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan maupun untuk pembiayaan pembangunan.

Kemampuan keuangan kita telah naik berlipat ganda. Apabila sepuluh tahun yang lalu kita masih menghitung Anggaran Negara dalam milyar rupiah maka dalam REPELITA II kita telah mulai menghitung dengan trilyun rupiah. Apabila sebelum tahun 1966 dahulu Anggaran Negara merupakan sumber utama inflasi yang memerosotkan kehidupan ekonomi kita, maka sekarang Anggaran Negara itu telah mampu menggerakkan roda-roda pembangunan kita dengan penyediaan anggaran pembangunan yang makin besar dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 1965 ekspor kita hanya mencapai 574 juta dolar Amerika, maka pada akhir REPELITA II ini, ekspor kita naik hampir 20 kali lipat sehingga mencapai sekitar 11,3 milyar dolar Amerika. Dengan makin besarnya penerimaan ekspor kita berarti bahwa kemampuan kita untuk memasukkan barang-barang yang kita perlukan juga



makin besar. Ini tampak jelas dari impor kita juga naik berlipat ganda dari tahun ke tahun, dengan susunan impor yang makin sehat, ialah makin banyak mengimpor barang modal dan bahan baku untuk mengembangkan industri di negeri sendiri. Tampaklah bahwa kemampuan produksi kita bertambah besar.

Pembangunan ekonomi memang harus berarti kenaikan produksi dan jasa. Dan kenaikan produksi itu telah kita capai dalam berbagai sektor, baik sektor pertanian, industri, pertambangan maupun prasarana.

Marilah kita lihat kemajuan di beberapa sektor. Di bidang pertanian tercapai kemajuan-kemajuan yang sangat berarti : jika dalam tahun 1968 produksi beras mencapai 11,6 juta ton, maka pada akhir REPELITA I telah meningkat menjadi 14,6 juta ton dan pada akhir REPELITA II meningkat lagi menjadi 17,6 juta ton. Selama REPELITA II produksi beras rata-rata naik dengan 3,9 % setahun, yang berarti melampaui laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,3% setahun.

Meskipun produksi beras kita terus meningkat dari tahun ke tahun, kita memang masih harus mengimpor beras. Tetapi perlu saya jelaskan, bahwa impor beras ini adalah untuk memperkuat stok nasional, yang sewaktu-waktu dapat kita lempar ke pasaran untuk mencukupi kebutuhan dan menjaga stabilitas harga-harga. Stok nasional ini perlu kita miliki, sebab panen beras kita tidak merata baik waktu maupun tempatnya. Ketidak merataan ini dapat menimbulkan kelangkaan di sesuatu daerah, yang jika tidak segera diatasi dapat mengakibatkan melonjaknya harga beras yang akan mendorong kenaikan harga-harga lain dan menggeli-sahkan masyarakat. Dalam REPELITA III, usaha meningkatkan produksi pangan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian akan diusahakan dengan sungguh-sungguh dalam rangka mengusahakan swasembada pangan dalam arti memenuhi kebutuhan untuk konsumsi langsung maupun untuk stok.

Sementara itu, kenaikan sektor pertanian lainnya juga kita catat dalam produksi perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan yang besar peranannya, baik dalam menaikkan penerimaan ekspor kita maupun dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam REPELITA III bidang-bidang inipun masih perlu ditingkatkan, karena memang masih sangat luas kemungkinan-kemungkinannya.

Dalam pada itu perkembangan sektor industri pada umumnya dapat dikatakan berjalan mantap dan memberi hasil-hasil yang memadai. Meskipun masih perlu penyempurnaan-penyempurnaan dan tindakan-tindakan yang lebih rasional dan efektif dalam sektor industri secara keseluruhan, namun dasar pembangunan yang telah diletakkan dalam REPELITA I dan II telah merupakan modal yang baik untuk memasuki REPELITA III. Selama REPELITA II tercatat terus meningkatnya jumlah dan nilai ekspor hasil produksi industri dalam negeri, perluasan berbagai unit produksi, serta perbaikan mutu dan corak barang-barang buatan dalam negeri. Untuk tahun-tahun mendatang kita perlu secara berkala meninjau struktur industri yang berlaku dengan tujuan untuk mencapai laju pertumbuhan industri yang tepat guna; dan juga untuk memperoleh keseimbangan pertumbuhan antara industri besar, sedang dan kecil.

Marilah kita lihat sepintas kemajuan-kemajuan industri kita dan produksinya, misalnya di bidang tekstil. Apabila sebelum tahun 1966 dahulu —lebih-lebih setiap kali menjelang Lebaran— kita harus berdiri dalam antrian yang panjang untuk mendapatkan sehelai-dua-helai bahan pakaian, maka sekarang dalam menghadapi Lebaran dan hari-hari raya lainnya tidak ada persoalan mengenai bahan sandang karena persediaan cukup banyak. Saat ini kita mampu menghasilkan 1,4 milyar meter tekstil, suatu kenaikan yang sangat tinggi jika kita banding dengan produksi pada akhir REPELITA I yang mencapai lebih dari 900 juta meter. Malahan kita sudah mulai mengekspor bahan pakaian dan pakaian jadi. Di bidang industri logam dasar juga jelas tampak kemajuan-kemajuan seperti industri kendaraan bermotor, elektronik dan industri baja, besi beton, kawat baja, lampu pijar dan sebagainya.

Kenaikan produksi di bidang industri itu jelas membawa serta kenaikan ketrampilan dan penguasaan teknologi. Di sini terkait peningkatan ketrampilan manusia pembangunan, yang tidak ternilai harganya.

Dalam rangka peningkatan ketrampilan dan penguasaan teknologi yang meningkat ini, antara lain meliputi industri pesawat terbang yang dalam tahun-tahun terakhir ini telah mulai memproduksi pesawat terbang dan helikopter. Sementara itu di bidang industri perkapalan kita masih perlu meningkatkan usaha-usaha kita untuk menanganinya. Sebagai negara kepulauan, maka kemampuan angkutan laut kita akan ditentukan antara lain oleh kemampuan kita dalam memproduksi kapal-kapal laut.

Kemajuan-kemajuan yang lebih pesat telah dicapai dalam bidang industri kimia. Dalam REPELITA II yang lalu itu telah terjadi lonjakan-lonjakan produksi industri kimia, seperti pupuk urea, semen, kertas, kaca polos, soda dan asam sulfat, obat hama dan lain-lain.

Kenaikan sejumlah produksi industri tadi sangat mengesankan, sehingga kita mencapai titik balik yang sangat penting. Jika dalam REPELITA I dahulu masih harus mengimpor pupuk urea dan semen yang sangat memberatkan devisa kita, maka sekarang kita sudah mulai mengekspor. Sejak dua tahun yang lalu kita mulai mengekspor pupuk urea ke berbagai negara di Asia dan Afrika sampai mencapai nilai ekspor hampir 81,5 juta dolar Amerika. Kita juga telah dapat mengekspor semen, ban-ban sepeda motor, ban mobil dan ban truk ke negara-negara ASEAN dan Australia.

Dalam pada itu industri kecil dan industri pedesaan juga banyak mencapai kemajuan berkat bimbingan dari Pemerintah; antara lain dengan bantuan modal, memberi berbagai macam latihan dan pendidikan, bantuan teknis dan sebagainya. Dewasa ini telah sangat banyak dan beranekaragam barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian jadi, sepatu, tas dan barang-barang lainnya hasil produksi kerajinan dan industri rumah tangga yang

dipasarkan di toko-toko dan pasar-pasar. Marilah kita terus menggalakkan produksi dalam negeri hasil produksi rakyat tersebut dengan meningkatkan kebiasaan kita untuk membeli barang-barang hasil produksi kita sendiri itu, yang tidak kalah—baik harga maupun mutunya— dengan barang-barang hasil luar negeri.

Kemajuan-kemajuan yang pesat di bidang industri yang dicapai dalam REPELITA II itu harus makin ditingkatkan lagi dalam REPELITA III ini, karena dalam REPELITA III ini harus makin jelas peranan industri dalam menciptakan keadaan ekonomi yang lebih seimbang dalam rangka menciptakan landasan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu suatu keadaan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri dengan dukungan bidang pertanian yang kuat. Seperti yang digariskan dalam GBHN, maka pembangunan industri dalam REPELITA III ini diarahkan untuk meningkatkan industri yang mengolah bahan Baku menjadi barang jadi. Dalam rangka inilah maka kita sekarang sedang mengerjakan pabrik peleburan alumina di Sumatera Utara (Proyek Asahan), meningkatkan dan melengkapi pabrik baja Krakatau Steel, membangun proyek listrik yang besar di Banten—Proyek Suralaya— dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya dan sebagainya.

Saudara-saudara;

Di bidang pertambangan, kita juga telah berhasil meningkatkan produksi dan ekspor. Kita juga telah dapat makin banyak mengolah hasil-hasil tambang itu di negeri sendiri.

Dalam pada itu selama REPELITA II kita telah memanfaatkan lebih baik kekayaan alam kita yang berupa gas bumi, baik untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri maupun untuk kita ekspor. Dalam tahun-tahun mendatang produksi gas bumi kita akan terus kita tingkatkan sehingga peranannya dalam menghasilkan devisa akan bertambah besar.

Dalam hal produksi minyak bumi kita masih terus berusaha untuk meningkatkannya dengan mengadakan eksplorasi-eksplorasi baru.

Dengan kenaikan harga minyak bumi seperti *yang* diputuskan oleh OPEC baru-baru ini, kita memang mendapat tambahan penerimaan negara dan devisa. Tetapi hendaknya kita ingat bahwa dibanding dengan negara-negara OPEC lainnya hasil minyak bumi kita itu tidaklah besar.

Di samping itu, karena kita masih belum memiliki cukup kilang minyak untuk mengolah bahan bakar minyak yang kita perlukan, maka kita masih harus mengimpornya sebagian dari kebutuhan kita. Karena itu kenaikan harga minyak OPEC juga berarti bertambah besarnya biaya pengadaan minyak di dalam negeri. Tetapi Pemerintah telah mengambil keputusan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak di dalam negeri, sebab kenaikan tadi belum akan terpikul oleh rakyat dewasa ini. Ini berarti bahwa Pemerintah harus menyediakan subsidi yang lebih besar untuk harga bahan bakar minyak di dalam negeri.

Namun kebijaksanaan yang demikian itu tidak dapat berlangsung terus, karena bukan saja merupakan pemborosan, melainkan juga tidak sesuai dengan prinsip pembangunan yang efektif dan efisien.

Kita harus menggariskan arah kebijaksanaan energi yang menyeluruh dan mantap yang akan mampu menanggulangi masalah energi dalam jangka panjang.

Kita bukan saja harus mulai menghemat penggunaan minyak bumi untuk pemakaian di dalam negeri, tetapi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar secepatnya dapat memanfaatkan semaksimal mungkin bahan energi yang lain yang terkandung di bumi Indonesia ini untuk kebutuhan kita.

Bahan energi seperti air dan panas bumi yang banyak terdapat di Indonesia dan yang tidak akan habis dipakai, apabila dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, akan dapat mengurangi pemakaian kita akan minyak bumi, sehingga

kita akan dapat memperbesar ekspor minyak bumi kita ke negara-negara yang sangat membutuhkannya. Makin cepat kita dapat melaksanakannya, maka makin besar tambahan devisa yang dapat kita peroleh, yang akan dapat menambah kemampuan kita dalam pembangunan.

Di samping itu kita juga harus-berusaha agar secepatnya dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan bahan bakar minyak, yang sekarang ini sebagian memang masih kita impor. Untuk itu kita perlu secepatnya membangun tambahan kilang minyak yang mutlak kita perlukan itu.

Peningkatan kemampuan ekonomi itu juga tampak dari bertambahnya prasarana pembangunan selama **REPELITA II** ini. seperti prasarana perhubungan —darat, laut, udara dan telekomunikasi— irigasi dan tenaga listrik yang pada gilirannya juga mendorong peningkatan dan kelancaran produksi.

Akhirnya secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa produksi nasional kita telah jauh meningkat dibandingkan dengan lima tahun yang lalu ketika kita baru mengakhiri **REPELITA I**.

Saudara Ketua yang terhormat;

Dengan selesainya **REPELITA II** ini bukan saja kemampuan ekonomi kita meningkat, tetapi peranan ekonomi kita dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata juga meningkat. Dalam hal ini pertama-tama dapat kita lihat dari peningkatan pembiayaan yang tersedia bagi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan, tenaga kerja dan transmigrasi, koperasi dan ekonomi lemah dan sebagainya. Dengan anggaran pembangunan bidang kesra yang terus meningkat itu maka kita telah dapat menyediakan sarana-sarana kesra yang jauh lebih besar dan lebih merata. Sebagai misal adalah bidang pendidikan, tampak jelas betapa besar peningkatannya selama **REPELITA II** ini dibandingkan dengan

akhir REPELITA I dahulu. Dalam REPELITA II telah kita bangun tidak kurang dari 31.000 buah gedung SD baru yang masing-masing terdiri dari 6 ruang kelas. Di samping itu telah diperbaiki tidak kurang dari 56.000 gedung SD negeri, SD swasta dan Madrasah Ibtidaiyah. Dengan demikian, selama REPELITA II telah dapat ditampung tambahan murid sekolah lebih dari 8 juta orang. Jumlah ini sudah merupakan 85% dari seluruh anak yang memerlukan pendidikan di SD, dibanding dengan 57% pada waktu kita mulai REPELITA II. Namun kita harus terus berusaha sekeras-kerasnya agar dalam REPELITA III ini kita dapat menampung seluruh anak-anak umur sekolah. Peningkatan mutu pendidikan ditingkatkan dengan penataran ratusan ribu tenaga guru, pengangkatan ratusan ribu guru-guru baru, penyediaan ratusan juta buku dan alat-alat peraga, perbaikan kurikulumnya dan sebagainya. Usaha-usaha yang sama juga dilakukan pada sekolah-sekolah kejuruan, pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas dan Pendidikan Tinggi. Meskipun pertambahan dan peningkatan prasarana pendidikan itu cukup tinggi, namun seluruh masalah pendidikan ini belum dapat kita pecahkan seluruhnya, karena kebutuhannya memang jauh lebih besar.

Peningkatan pembangunan sarana-sarana sosial yang cukup besar dalam REPELITA II juga meliputi bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan sebagainya yang terlalu panjang untuk disebutkan satu persatu. Kesemuanya dapat dipelajari dalam lampiran pidato ini.

Meskipun kita telah berbuat banyak untuk meningkatkan pembangunan bidang kesra itu, namun kebutuhan kita jauh lebih besar dari kemampuan yang tersedia. Oleh karena itu kita masih harus terus meningkatkan kemampuan kita. Dan kemampuan itu hanya mungkin kita tingkatkan, apabila kita berhasil meningkatkan kemampuan ekonomi kita.

Cepat atau lambatnya kita dapat mengatasi masalah-masalah sosial serta melaksanakan pembangunan sarana-sarana sosial, antara lain akan tergantung pada lajunya peningkatan kemampuan ekonomi kita. Oleh karena itulah maka pertumbuhan ekonomi yang memadai merupakan salah satu asas yang penting dari TRILOGI Pembangunan.

Kenyataan lain yang menunjukkan bahwa peranan ekonomi kita selama masa pembangunan ini makin besar dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, adalah bertambah besarnya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Selama tahun 1971 — 1976 saja misalnya, kita telah dapat memberi lapangan kerja baru kepada 9 juta orang. Dan sekarang ini jumlah itu lebih besar. Ini berarti bahwa selama ini investasi-investasi yang kita lakukan dan pembangunan yang kita laksanakan memang telah menciptakan lapangan kerja. Namun lapangan kerja yang tersedia pun masih belum mencukupi bagi tenaga kerja yang mencari lapangan kerja. Ini menunjukkan betapa lapangan kerja harus kita tangani lebih saksama. Dan itu hanya mungkin dengan melanjutkan dan meningkatkan pembangunan yang selama ini telah kita laksanakan. Itulah sebabnya, jalur keempat dari "Delapan Jalur Pemerataan" yang akan kita tempuh dalam REPELITA III ini adalah pemerataan kesempatan kerja.

Itulah pula sebabnya mengapa kebijaksanaan anggaran negara, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan perkreditan, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan pembangunan antara lain menempatkan perluasan kesempatan kerja itu sebagai salah satu tujuannya.

Masalah yang kita hadapi dalam bidang ketenagakerjaan adalah pesatnya pertumbuhan penduduk, angkatan kerja yang kebanyakan tidak memiliki ketrampilan, penyebaran penduduk yang kurang merata dan pasar kerja yang timpang.

Kita harus memberi jawaban yang tepat terhadap masalah-



masalah tadi. Karena itulah, antara lain, kita telah berusaha mengerem pesatnya pertumbuhan penduduk melalui program nasional keluarga berencana. Kita telah dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,3% menjadi 2% setahun, sehingga kita sekarang dijadikan contoh oleh sesama negara berkembang lainnya dalam melaksanakan program keluarga berencana. Usaha-usaha pengendalian pertumbuhan penduduk ini masih harus kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang.

Dalam rangka memecahkan masalah penduduk dan lapangan kerja tadi, maka kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan transmigrasi sebanyak 500.000 kepala keluarga yang dalam REPELITA III ini akan kita pindahkan dari daerah yang padat penduduknya.

Peranan pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata dapat kita lihat pula dari makin meningkatnya kemampuan untuk memperluas bantuan kepada golongan ekonomi lemah, seperti misalnya Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Mini, Kredit Pasar Inpres dan Kredit Candak Kulak.

Sampai dengan akhir REPELITA II yang baru lalu, pemberian KIK yang disetujui mencapai Rp. 113 milyar dengan nasabah 57.000 orang; sedangkan melalui KMKP tersalur kredit sebesar Rp. 188 milyar yang telah membantu tidak kurang dari 438.000 pengusaha kecil untuk meningkatkan dunia usahanya. Kredit Mini yang khusus disediakan untuk pedagang dan pengusaha kecil di pedesaan, yang mulai kita adakan dalam tahun 1974, mencapai posisi pinjaman sekitar Rp. 16 milyar pada akhir bulan Maret yang baru lalu, sedangkan Kredit Pasar Inpres yang diberikan kepada Pemerintah-pemerintah Daerah untuk menampung pengusaha-pengusaha kecil di daerah sejak tahun 1976 telah mencatat perkembangan yang sangat pesat, ialah mencapai jumlah kredit sebesar Rp. 27 milyar. Kredit Candak Kulak yang juga mulai kita salurkan pada tahun 1976 telah mampu membebaskan beribu-ribu pedagang kecil di pedesaan dari hisapan lintah darat, dan telah pula menciptakan iklim usaha di desa yang menggairahkan. Sampai akhir Maret yang lalu Kredit Candak Kulak yang tersalur mencapai jumlah Rp. 16 milyar.

Dari kenyataan-kenyataan tadi, tampaklah jelas bahwa pembangunan yang kita kerjakan ini memang telah menjangkau golongan ekonomi lemah dan telah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan meningkatkan kemampuan "orang-orang kecil", yang berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil pula. Dalam REPELITA III usaha-usaha meningkatkan dan mengangkat martabat rakyat kecil dan golongan ekonomi lemah akan makin digalakkan. Disamping melanjutkan kebijaksanaan perkreditan seperti saya sebutkan tadi, yang akan diusahakan diperlancar prosedurnya, juga akan dilakukan antara lain melalui kebijaksanaan pembinaan koperasi (BUUD/KUD) di setiap wilayah unit desa, dan dengan mendorong partisipasi para pengusaha golongan ekonomi lemah dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah yang jumlahnya juga akan terus meningkat (Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1979).

Saudara Ketua yang terhormat;

Dengan kemampuan ekonomi kita yang terus meningkat itu, ternyata juga telah mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional kita.

Hal ini tampak jelas dari kenyataan selama ini bahwa kita mampu bertahan terhadap gejolak-gejolak ekonomi dari dalam maupun dari luar. Kendatipun kita terpukul oleh kesulitan keuangan Pertamina yang terjadi beberapa tahun yang lalu, walaupun kita juga mengalami berbagai macam bencana alam kekeringan dan serangan hama yang merusak produksi pangan, namun selama ini kita tetap dapat mencapai pertumbuhan dan memelihara stabilitas ekonomi. Kita juga telah mampu bertahan terhadap hantaman dari luar yang timbul karena berbagai krisis dunia yang akibat-akibatnya tetap terasa sampai sekarang seperti krisis ekonomi, krisis moneter dan apa yang biasanya dinamakan krisis energi. Dan justru agar kita memiliki daya tahan terhadap perubahan-perubahan situasi ekonomi dunia di tahun-tahun yang akan datang, maka pagi-pagi; pada saat ketahanan ekonomi kita memadai, Pemerintah telah mengambil serangkaian langkah yang

dikenal sebagai "Kebijaksanaan 15 November". Sasaran jangka pendek dari kebijaksanaan itu telah dapat tercapai, antara lain dengan mantapnya nilai tukar mata uang rupiah. Namun, sebagai suatu kebijaksanaan yang demikian mendasar dan demikian banyak aspek-aspeknya, tentulah kita belum dapat merasakan hasil-hasilnya yang nyata hanya dalam waktu delapan bulan setelah kebijaksanaan yang kita ambil itu. Tetapi, dengan keberanian kita untuk mengambil keputusan dalam bulan November tahun yang lalu itu, maka bagian yang penting dari pengamanan REPELITA III telah kita lakukan, ialah untuk tetap memperbesar penerimaan devisa melalui ekspor dalam menghadapi perkembangan ekonomi moneter dunia yang kurang menentu dalam tahun-tahun mendatang. Perkembangan sejak kita mengambil "Kebijaksanaan 15 November" sampai saat ini menunjukkan adanya kenaikan ekspor —di luar minyak bumi— yang cukup berarti, seperti : kayu, karet, timah, minyak sawit, teh, lada dan ekspor barang-barang industri seperti : pupuk urea, semen, tekstil dan pakaian jadi, dan sebagainya.

Segera dapat kita lihat bahwa arah dari perkembangan kenaikan nilai ekspor kita cukup melegakan. Dan pada gilirannya kegairahan ekspor ini akan mendorong gairah produksi di dalam negeri yang berarti pula terbukanya lapangan kerja.

Dalam pada itu, laju inflasi selama REPELITA II cukup terkendali. Bahkan dalam tahun 1978 laju inflasi berada dibawah 7%. Memang, kita berharap agar laju inflasi dalam tahun-tahun mendatang dalam REPELITA III tetap terkendali dan mantap. Namun kita tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh inflasi dunia, yang mau tidak mau juga terbawa masuk ke Indonesia. Laju inflasi itu dalam tahun ini juga tidak mungkin ditekan lebih rendah lagi karena berbagai sebab yang berhubungan dengan pelaksanaan "Kebijaksanaan 15 November" seperti penyesuaian berbagai harga barang pokok dan tarip angkutan serta penyesuaian harga BBM di dalam negeri.

Saudara Ketua dan Sidang yang terhormat;

Sebenarnya, kita memang telah mencapai banyak kemajuan setelah kita menyelesaikan REPELITA II, sekalipun kita tidak boleh menutup mata bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dan bahkan kegagalan-kegagalan dalam beberapa hal.

Kita tentu dapat mengatakan bahwa sebenarnya, kita dapat memperoleh kemajuan yang lebih besar dan lebih baik daripada yang dicapai sekarang, seandainya tidak ada kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan itu. Namun sebaliknya juga tidak dapat disangkal bahwa seandainya kita tidak melaksanakan pembangunan seperti yang kita lakukan sekarang dan tidak mencapai hasil seperti yang kita peroleh sekarang, niscaya keadaan kita jelas sangat parah, lebih parah daripada zaman sebelum Orde Baru dahulu.

Saudara Pimpinan dan Sidang yang terhormat;

Dalam kesempatan ini saya perlu untuk ke sekian kalinya menjelaskan mengenai pinjaman luar negeri. Hal ini perlu saya terangkan kembali karena akhir-akhir ini masalah tersebut dibicarakan orang lagi dengan nada yang keliru.

Tidak seorangpun di antara kita yang cinta demokrasi dan cinta kepada Tanah Air ini akan keberatan jika kita membicarakan hal-hal yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Akan tetapi, adalah juga tanggungjawab demokrasi dan tanggungjawab kita kepada bangsa ini, jika kita membicarakan sesuatu dengan rasa tanggungjawab yang besar.

Akhir-akhir ini dilontarkan pandangan ke dalam masyarakat mengenai pinjaman luar negeri yang sama sekali tidak benar dan menyesatkan, dengan cara menyajikan data-data yang tidak lengkap. Malahan, ada yang mengatakan bahwa dengan makin membesarnya pinjaman luar negeri selama Orde Baru, seolah-olah Republik tercinta ini telah "terjual" dan hanya akan membebani anak cucu kita, generasi yang akan datang.

Saya tegaskan di sini bahwa kita tidak akan "menjual" negara kita dengan harga berapapun; juga tidak akan memberikan beban kepada generasi yang akan datang. Pinjaman luar negeri tidak ada sangkut pautnya dengan "menjual" negara.

Kita perlu menjernihkan kembali pikiran kita mengenai hal itu karena ia menyangkut bagian dari siasat pembangunan kita. Juga karena mengenai hal itu menyangkut kebanggaan dan harga diri kita

Marilah kita camkan baik-baik : kita tidak perlu kehilangan harga diri dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri karena menerima pinjaman dari luar ! Banyak negara-negara lain yang kini tergolong di barisan depan negara-negara maju, dahulu pun mereka pernah menerima bantuan luar negeri untuk memulihkan kehidupan perekonomiannya. Dan juga jangan kita lupakan, bahwa dewasa ini kerjasama dan Bantu membantu telah menjadi pola dari tata susunan hubungan antar negara.

Pembangunan dalam zaman moderen ini memerlukan modal, ketrampilan dan teknologi. Dengan menyebutkan ketiga unsur tadi, tentu saja, saya sama sekali tidak mengecilkan arti manusia sebagai pelaksana dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dan kita tidak perlu malu-malu mengakui bahwa kita masih belum cukup memiliki modal, ketrampilan dan teknologi tadi.

Memang, sejak kita melaksanakan REPELITA I dahulu hingga awal REPELITA III sekarang ini modal yang dapat kita kerahkan dengan kekuatan sendiri makin besar, ketrampilan yang kita miliki makin tinggi dan beraneka ragam, teknologi yang kita kuasai juga makin maju. Namun, masalah yang kita hadapi dan harus segera kita atasi jauh lebih besar dari segala kemampuan sendiri yang dapat kita kerahkan. Sedangkan, di lain pihak, pembangunan itu harus kita percepat agar tingkat kesejahteraan umum bertambah baik. Inilah alasan paling pokok mengapa kita menerima pinjaman dari luar dan membuka diri untuk penanaman modal asing di sini.

Seperti kita semua telah mengetahui, sejak tahun 1967 kita menerima bantuan dari sejumlah negara dan badan-badan internasional yang tergabung dalam IGGI. Negara-negara yang tergabung dalam IGGI adalah negara-negara Barat. Tetapi hal ini sama sekali tidak berarti bahwa politik luar negeri kita berkiblat ke sana. Lebih-lebih tidak berarti bahwa kita tinggalkan politik luar negeri yang bebas aktif.

Apabila kita waktu itu menerima pinjaman dari negara-negara dan badan-badan internasional yang tergabung dalam IGGI, maka sebabnya adalah karena mereka itulah yang bersedia memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang lunak dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Kita hanya bersedia menerima pinjaman luar negeri yang syarat-syaratnya kita tentukan. Untuk itu diadakan perundingan-perundingan dalam forum IGGI. Seperti telah pernah saya kemukakan dalam berbagai kesempatan syarat-syarat pinjaman yang kita terima itu adalah : pertama, pinjaman itu tidak boleh disertai dengan ikatan-ikatan politik; kedua, pinjaman itu kita gunakan sesuai dengan rencana pembangunan kita; dan ketiga, kita hanya mau menerima pinjaman yang sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar kembali.

Dalam perkembangan selanjutnya, kita juga telah menerima pinjaman dari negara-negara Eropa Timur dan negara-negara Timur Tengah setelah mereka dapat memberikan syarat-syarat pinjaman yang sesuai dengan yang kita inginkan.

Pinjaman yang kita terima kita gunakan sepenuhnya untuk mendorong kenaikan produksi dan memperkuat ekonomi serta melancarkan pembangunan kita. Sedangkan pengembalian pinjaman tersebut tidak boleh mengganggu jalannya pembangunan selanjutnya. Dalam syarat-syarat pinjaman yang lunak itu antara lain kita meminta agar bunganya rendah dan jangka pengembaliannya cukup panjang. Pinjaman jangka panjang ini kita gunakan untuk membangun proyek-proyek yang secepatnya atau segera dapat menghasilkan. Ini berarti bahwa pengembalian pinjaman

tadi kita bayar dengan sebagian hasil proyek itu sendiri. Dengan pinjaman berjangka panjang tadi, maka pengembaliannya pun dapat kita rentang, sehingga meringankan sekali dan segera memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menikmati hasilnya. Dan karena pengembalian pinjaman itu kita bayar dari sebagian kecil hasil proyek-proyek itu sendiri, maka jelas, bahwa kita sama sekali tidak meninggalkan beban kepada anak cucu. Malahan sebaliknya, anak cucu kita akan mewarisi berbagai proyek pembangunan yang seakan-akan tinggal memetik hasilnya saja.

Karena itu, hendaknya jelas bagi kita semua, bahwa pinjaman luar negeri adalah jalan pintas yang dengan sadar kita ambil untuk mempercepat jalannya pembangunan. Tanpa menempuh jalan pintas itu, rencana-rencana pembangunan kita menjadi tidak realistis. Sebab, tanpa percepatan pembangunan kita akan terkejar oleh berbagai masalah sosial ekonomi yang makin besar. Dan kalau ini terjadi, maka berarti usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat makin bertambah sulit dicapai. Juga jangan kita lupakan, bahwa tanpa mempercepat jalannya pembangunan tadi, maka kita akan makin tertinggal dari negara-negara lain. Oleh karena itu janganlah dikira, bahwa dengan menerima pinjaman luar negeri itu kita melupakan idealisme perjuangan kita. Justru karena kita ingin mencapai cita-cita perjuangan kita, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila secepat mungkin, maka kita susunlah tahapan-tahapan pembangunan dan strategi pelaksanaannya antara lain dengan menerima pinjaman luar negeri ini.

Memang, negara-negara lain —khususnya yang memberi pinjaman - tentu saja mempunyai kepentingan terhadap Indonesia, seperti halnya kita juga mempunyai kepentingan terhadap mereka. Ini adalah hal yang sangat wajar, sebab dunia yang bertambah maju dengan pesat ini, membuat semua bangsa saling memerlukan. Tetapi adalah tidak masuk akal, jika hanya karena negara-negara lain memerlukan kita, lalu kita menutup diri dan

tidak mau memanfaatkan kelebihan modal, teknologi dan ke-trampilan mereka. Yang penting adalah, agar kita mengamankan diri, supaya pinjaman luar negeri itu tidak mengurangi kedaulatan kita di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi. Seperti saya jelaskan tadi, pengamanan itu telah kita lakukan. Dan jangan dilupakan bahwa segala kebijaksanaan dan strategi pembiayaan pembangunan ini sebenarnya adalah putusan Rakyat sendiri seperti dituangkan dalam GBHN dan berbagai Undang-undang termasuk Undang-undang APBN setiap tahunnya.

Untuk membuat lebih jelas kembali duduk soal masalah ini, akan saya jelaskan posisi pinjaman luar negeri itu.

Pada awal tahun ini, pinjaman luar negeri kita berjumlah 13 milyar dolar Amerika. Dalam jumlah ini 2,6 milyar dolar merupakan pinjaman yang dibuat sampai tahun 1965, sedangkan sebesar 10,4 milyar dolar kita terima selama 13 tahun yang terakhir ini.

Memang, jumlah pinjaman luar negeri kita bertambah besar dari tahun ke tahun, akan tetapi pengeluaran pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri semakin kecil dari tahun ke tahun jika kita banding dengan pengeluaran pembangunan yang berasal dari kemampuan kita sendiri. Selama REPELITA I lebih dari setengah pengeluaran pembangunan kita biayai dengan pinjaman luar negeri. Dalam REPELITA II –dengan meningkatnya Tabungan Pemerintah– maka pinjaman luar negeri turun menjadi sekitar sepertiga dari pengeluaran pembangunan. Demikianlah, kita terus berusaha agar dalam REPELITA III nanti bagian pinjaman luar negeri tadi relatif menjadi lebih kecil lagi, dibandingkan dengan pembiayaan yang berasal dari kemampuan sendiri. Dengan demikian maka pinjaman luar negeri itu merupakan pelengkap dari sumber pembiayaan dari dalam negeri dan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Gambaran lain mengenai meningkatnya kemampuan kita tampak dalam nilai produksi nasional.



Dalam tahun 1965, dengan posisi hutang 2,6 milyar dolar Amerika, nilai produksi nasional hanya sebesar 4 milyar dolar saja. Ini berarti bahwa pinjaman luar negeri kita dalam tahun 1965 itu berjumlah 65% dari nilai produksi nasional. Sedangkan gambaran sekarang menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1978 ketika jumlah hutang luar negeri kita berjumlah 13 milyar, produksi nasional kita telah mencapai nilai tidak kurang dari 52 milyar dolar Amerika. Ini berarti bahwa jumlah pinjaman luar negeri kita hanya 20% dari nilai produksi nasional.

Gambaran tadi dengan jelas menunjukkan, bahwa —setelah tahun 1965— pinjaman luar negeri telah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ikut menaikkan produksi nasional. Hutang luar negeri memang meningkat 4 kali lipat, tetapi produksi nasional meningkat sampai 13 kali lipat. Peningkatan yang begitu pesat dari produksi nasional itu jelas bukan hanya disebabkan oleh bertambahnya hutang luar negeri, tetapi setidaknya pertambahan pinjaman tersebut telah ikut mendorong mempercepat peningkatan produksi nasional.

Gambaran lain mengenai peningkatan kemampuan ekonomi kita dalam hubungannya dengan hutang luar negeri adalah mengenai peningkatan hasil ekspor kita. Pinjaman luar negeri pada tahun 1965 berjumlah 2,6 milyar dolar. Ketika itu hasil ekspor kita —tidak termasuk ekspor minyak— hanya mencapai 424 juta dolar, sedangkan pada tahun 1978 ketika pinjaman luar negeri 4 kali lipat besarnya, hasil ekspor non minyak kita telah mencapai jumlah 3.659 juta dolar, berarti telah meningkat menjadi hampir 9 kali lipat.

Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 1965, ketika hutang luar negeri kita berjumlah 2,6 milyar dolar, pada saat itu kita mempunyai kewajiban membayar kembali sebesar 250 juta dolar. Apabila penerimaan devisa kita dari ekspor termasuk minyak berjumlah 575 juta dolar, maka ini berarti bahwa kewajiban membayar hutang luar negeri adalah sebesar 44% dari hasil ekspor kita. Sekarang hutang luar negeri kita memang ber-

jumlah makin besar, tetapi kewajiban pembayaran kembali hanya sebesar 14% dari seluruh hasil ekspor kita. Gambaran tadi menunjukkan bahwa dalam tahun 1978 kemampuan kita membayar pinjaman luar negeri jauh lebih besar dari kemampuan dalam tahun 1965.

Mungkin sebagian dari kita sudah lupa akan kenyataan bahwa pada tahun 1965 dan 1966 kita sudah tidak mampu lagi untuk membayar kembali cicilan hutang luar negeri, sehingga pada waktu itu dengan susah payah kita adakan perundingan-perundingan dengan negara-negara pemberi pinjaman agar dapat diadakan penundaan atau "rescheduling" pembayaran cicilan pinjaman luar negeri.

Meskipun kemampuan kita untuk memperoleh pinjaman luar negeri sebenarnya masih besar, namun kita memang sangat berhati-hati dalam menerima pinjaman luar negeri ini, agar tidak membahayakan keselamatan ekonomi kita.

Juga perlu kita perhatikan bahwa dalam tahun 1966 jumlah cadangan devisa kita adalah minus. Sekarang, dalam akhir REPELITA II, cadangan devisa kita telah naik berlipat ganda sehingga mencapai lebih dari 2,9 milyar dolar Amerika.

Sekali lagi, dari gambaran yang saya kemukakan tadi, tampak jelas bahwa pinjaman luar negeri telah kita gunakan dengan baik, sehingga kemampuan-kemampuan kita berlipat ganda. Naiknya kemampuan ini jelas memberi pengaruh yang baik pula terhadap tercapainya kemajuan pembangunan dan bertambah baiknya kesejahteraan rakyat.

Saudara Ketua yang terhormat;

Ada baiknya juga kita membuat perbandingan dengan negara-negara lain. Hal ini perlu untuk meyakinkan diri kita sendiri apakah pinjaman luar negeri itu telah kita terima dan kita gunakan secara pantas dan apakah menerima pinjaman luar negeri itu suatu cela. Untuk membuat perbandingan itu kita dapat menggu-

nakan 16 negara —termasuk kita— yang menggunakan pinjaman luar negeri untuk membangun dirinya. Negara-negara itu kita ambil dari Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, yang beberapa di antaranya tergolong yang maju di antara negara-negara yang sedang membangun.

Dilihat dari sudut besarnya cicilan setiap tahun dengan devisa yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan, kita tergolong baik jika dibanding dengan negara-negara lain tadi. Dalam tahun 1978 jumlah cicilan hutang kita sekitar 14% dari seluruh penerimaan devisa. Angka ini menempati urutan ke-7 dari yang kecil dari 16 negara tadi. Demikian juga jika kita gunakan ukuran hasil perbandingan antara posisi cadangan devisa dengan posisi pinjaman luar negeri, maka dalam tahun 1978 angka perbandingan Indonesia adalah 20%. Dengan angka ini, kita menduduki urutan ke-4 dengan persentase kecil, yang jelas jauh lebih rendah dibanding dengan angka rata-rata negara-negara lain sebesar 44%.

Ditinjau dari persyaratan pinjaman, juga ternyata bahwa syarat pinjaman luar negeri kita itu tergolong yang paling baik di antara 16 negara tadi, ialah rata-rata jangka waktu pengembalian 17 tahun dan dengan suku bunga rata-rata 4% setahun.

Dari ukuran-ukuran dan perbandingan tadi, kita dapat meyakinkan kita semua, bahwa kita tidak perlu merisaukan penerimaan dan pemakaian pinjaman luar negeri, yang kita terima ini, karena memang dapat dipertanggung jawabkan baik secara politis maupun ekonomis.

Itulah sebabnya, mengapa kita selalu mendapat tawaran pinjaman dari luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dari dunia luar kepada kita, karena pinjaman luar negeri itu kita gunakan secara baik sehingga kita mampu mengembalikannya.

Dengan penjelasan saya yang panjang lebar itu, mudah-mudahan jelas bagi kita semua duduk soal yang sebenarnya dari pinjaman luar negeri kita.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Demikianlah posisi dan keadaan nasional kita setelah dua kali melaksanakan PELITA dalam 10 tahun terakhir ini. Kita telah mencapai banyak kemajuan baik dalam bidang sosial-politik maupun sosial-ekonomi: Dan hasil-hasil itu juga telah dapat memperkuat ketahanan nasional kita. Namun jelas bahwa kita masih harus terus membina dan memperkuatnya sejalan dengan perkembangan keadaan nasional dan internasional. Sebab, tanpa ketahanan nasional yang kokoh itu kita akan terombang-ambing oleh perkembangan dunia, yang apabila kita tidak siap dan waspada dapat menyeret kita ke arah kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan dan tujuan kita sendiri.

Beberapa tahun yang lalu, di hadapan Sidang Dewan yang terhormat ini saya kemukakan, bahwa dunia sedang bergerak dan berubah dengan cepat. Gerak dan perubahan itu bertambah jelas dengan adanya berbagai kejadian penting yang berurutan, terutama dalam bulan-bulan terakhir ini : Perjanjian Perdamaian Mesir — Israel bulan Maret yang lalu, Perjanjian Pembatasan Senjata-senjata Strategis II antara Amerika Serikat dan Soviet Uni, Konperensi UNCTAD ke-V di Manila, KTT negara-negara industri di Tokyo kurang dari dua bulan yang lalu, perkembangan yang mencemaskan di berbagai kawasan dunia khususnya di kawasan Indocina dan masalah pengungsi, serta awan gelap krisis dan resesi ekonomi yang membuat suramnya dunia.

Rentetan peristiwa itu menunjukkan betapa dunia menyadari bahwa seluruh umat manusia seolah-olah makin mendekati persimpangan jalan yang menentukan hidup atau mati. Namun, di balik perjanjian-perjanjian dan konperensi-konperensi itu dunia juga makin sadar bahwa lebih baik memilih damai daripada perang, lebih baik memilih kesejahteraan bersama daripada kesengsaraan, lebih baik berdialog daripada konfrontasi.

Dalam mengikuti dan menghadapi peristiwa dan gerak dunia itu, sikap dasar kita sangatlah jelas, ialah seperti yang ditunjukkan oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Kita bukan saja ingin, melainkan kita berjuang di segala forum ke arah terwujudnya dunia yang demikian tadi.

Dalam tahapan perjuangan sekarang ini maka pelaksanaan politik luar negeri kita didasarkan pada ketentuan GBHN yang menyatakan bahwa politik luar negeri kita yang bebas dan aktif harus diabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya kepentingan pembangunan. Dalam pelaksanaannya maka kita harus tetap mengambil sikap yang tegas dalam menghadapi berbagai masalah dunia yang menjadi sumber ketidak tertiban, yang meremehkan kemerdekaan, yang membahayakan perdamaian dan yang melawan keadilan sosial, dengan bimbingan "kepala dingin", perhitungan yang matang dan kebijaksanaan.

Terhadap masalah Timur Tengah sikap kita sangat realistis dan berpijak pada asas kemerdekaan dan keadilan. Kita selamanya mendukung perjuangan bangsa-bangsa Arab dan Rakyat Palestina untuk memperoleh kembali wilayah-wilayah Arab yang diduduki secara tidak sah oleh Israel. Kita mendukung perjuangan Rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-haknya yang sah, terutama hak mendirikan negaranya sendiri yang merdeka. Kita juga menyokong penuh dipulihkannya kedudukan kota suci Yerusalem. Sebagai sahabat kita percaya bahwa saudara-saudara kita bangsa Arab di Timur Tengah dapat menyelesaikan sendiri perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka mengenai perjuangannya ke arah itu. Dan sebagai sesama negara berdaulat kita menghargai putusan apapun yang mereka ambil, yang mereka anggap paling baik.

Kita berharap perdamaian lambat laun akan muncul di Timur Tengah, yang sebelum ini selalu mencemaskan kita semua, karena

sewaktu-waktu dapat merembet ke mana-mana yang akhirnya meledakkan dunia.

Dalam suasana yang sedang merasakan panas dinginnya ketegangan itu, dunia menyaksikan penandatanganan Perjanjian Pembatasan Senjata-senjata Strategis II antara Amerika Serikat dengan Soviet Uni. Memang, kita masih harap-harap cemas menunggu perkembangan lebih lanjut dari perjanjian yang penting ini. Namun bagaimanapun juga, perjanjian itu sedikit banyak menciptakan suasana peredaan ketegangan, walaupun di kawasan Eropa dua kekuatan pakta militer dengan segala persenjataan mutakhir sedang berhadap-hadapan. Dengan peredaan ketegangan tadi, kita harapkan agar Eropa mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk memikirkan masalah di luar kawasannya, terutama masalah pembangunan ekonomi dan perdagangan yang sedang diusahakan peningkatannya oleh negara-negara yang sedang berkembang.

Kita mengharapkan agar peredaan ketegangan antara kekuatan-kekuatan besar dunia benar-benar mempunyai arti bagi semua negara lainnya, terutama bagi negara-negara dunia ketiga.

Negara-negara dunia ketiga yang sebagian besar merupakan negara-negara muda dan sedang membangun termasuk Indonesia—dan umumnya adalah negara-negara non blok, dewasa ini sedang dalam ujian yang berat. Sulit kita mengatakan bahwa sekarang ini ada persatuan yang kokoh dan kesetiakawanan yang kuat dalam gerakan non blok. Apabila negara non blok ingin tetap mempunyai peranan dan kekuatan dalam dunia yang sedang berubah sekarang ini, apabila negara-negara non blok ingin mempertahankan kestabilan dan kemajuan bersama, maka tidak ada pilihan lain daripada keharusan negara-negara non blok itu untuk memurnikan semangat dan tujuannya. Tanpa kemurnian ini maka gerakan non blok sudah tidak ada artinya lagi, karena telah terpecah-pecah memihak kepada salah satu kekuatan besar dunia.

Dewasa ini dunia yang kita hadapi dan masalah-masalah pokoknya sudah berubah dan berlainan. Dewasa ini masalah yang paling besar dan mendesak adalah bagaimana menaikkan taraf hidup rakyat dari negara-negara dunia ketiga yang merupakan bahagian terbesar dari umat manusia ini. Perjuangan ini tidak kalah pentingnya dari perjuangan politik gerakan non blok dahulu, ialah untuk membebaskan dunia dari kolonialisme. Tidak ada gunanya apabila penjajahan telah lenyap dari muka bumi, akan tetapi kemelaratan dan keterbelakangan yang ditinggalkannya tetap membuat beratus-ratus juta umat manusia terus menderita.

Dengan kata lain gerakan non blok perlu memusatkan diri pada perjuangan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru. Potensi untuk ini jelas ada, sebab dunia ketiga umumnya kaya dengan sumber bahan mentah dan bahan-bahan strategis lainnya, serta potensi penduduknya besar, yang kedua-duanya membuka banyak kemungkinan di masa datang. Yang diperlukan adalah persatuan di antara semua negara-negara non blok. Dan jaminan ke arah persatuan ini --seperti saya katakan tadi-- tidak lain adalah kembali kepada kemurnian semangat dan tujuan gerakan non blok.

Inilah sikap dasar Indonesia mengenai masa depan gerakan non blok. Dan sikap inilah yang akan dibawa oleh delegasi Indonesia ke KTT non blok yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Saudara Wakil Presiden Adam Malik.

Dalam rangka menciptakan tatanan ekonomi dunia baru kita terus gigih berjuang, berperan dan memberikan sumbangan-sumbangan pikiran dalam berbagai forum dunia : dalam Dialog Utara - Selatan, dalam UNCTAD ke-V di Manila baru-baru ini dan lain-lain.

Kita tidak ingin berkonfrontasi dengan negara-negara maju, sebab konfrontasi tidak menyelesaikan persoalan. Dengan teguh kita ingin meyakinkan negara-negara maju agar mereka menunjukkan kesediaannya untuk memenuhi dan mewujudkan cita-cita umat manusia untuk menciptakan tata ekonomi dunia yang lebih adil, yang menjamin kesempatan yang sama bagi semua bangsa

untuk maju dan hidup sejahtera. Ini adalah kepentingan seluruh umat manusia : sama sekali bukan hanya kepentingan negara-negara yang sedang membangun, akan tetapi juga kepentingan negara-negara maju sendiri. Ini adalah kepentingan perdamaian dunia yang berkeadilan.

Dalam situasi dunia yang cukup rumit dan tidak menentu itu, kita di Asia Tenggara ini dihadapkan pada masalah-masalah baru. Kita sedang mengalami suatu perkembangan yang menancam. Yang saya maksud adalah kemelut bersenjata di Indocina, khususnya masalah Kamboja dan masalah pengungsi yang menimbulkan kesulitan kepada negara-negara di kawasan ini.

ASEAN dengan sungguh-sungguh telah berusaha memberikan jasa-jasa baik untuk mencari penyelesaian secara damai atas kemelut bersenjata di Indocina itu. Kita telah dengan cepat menyampaikan pendapat dan seruan seperti yang tercantum dalam Pernyataan Jakarta tanggal 9 Januari 1979, Pernyataan Bangkok tanggal 12 Januari 1979 dan 19 Februari 1979 yang pada pokoknya isinya adalah agar pihak-pihak yang bersengketa di wilayah Indocina menghentikan pertikaian bersenjata dan menarik mundur pasukan militer masing-masing.

Pernyataan-pernyataan ASEAN tersebut ternyata telah dijadikan inti rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang sayang sekali tidak dapat menjadi resolusi hanya karena veto. Namun usaha-usaha untuk terlaksananya seruan ASEAN tersebut akan terus dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dengan mengadakan berbagai pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Yang kita inginkan adalah agar negara-negara di kawasan kita ini mau dan dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip hidup bertetangga baik, saling hormat menghormati tanpa mencampuri urusan dalam negeri, masing-masing dan bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya masing-masing. Dengan demikian akan dapat diciptakan wilayah Asia Tenggara ini sebagai wilayah yang damai, bebas dan netral.



Saudara Pimpinan yang terhormat;

Terhadap masalah pengungsi Vietnam kita malahan berbuat lebih banyak lagi. Kita tidak saja mencoba memberi jasa-jasa baik, malahan telah turut menangani secara nyata. Kita telah memberi penampungan sementara kepada mereka. Kita telah menyediakan tempat pemrosesan untuk persiapan pemberangkatan ke pemukiman baru di negara-negara lain yang sanggup menerima. Dalam hal ini kita telah bekerjasama dengan baik dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi.

Dalam rangka ini saya ingin menegaskan, bahwa sejak semula Indonesia telah menyatakan bahwa kita tidak dapat menerima pengungsi untuk menetap terus di Indonesia. Kita tidak mampu berbuat demikian, karena masih terlalu banyak masalah yang harus kita tangani untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat kita sendiri.

Kita memang telah mengulurkan tangan kemanusiaan yang tulus terhadap puluhan ribu pengungsi yang terdiri dari orang-orang lanjut usia, laki-laki dan wanita, remaja dan anak-anak, malahan bayi-bayi. Demi sesama manusia, dan atas nama kemanusiaan kita dengan tulus telah berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita.

Mengingat beratnya masalah pengungsi, latar belakang dan akibat kelanjutannya, maka kita menyerukan kepada masyarakat dunia untuk menaruh perhatian dan langkah nyata yang lebih besar agar masalah pengungsi ini dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas. Konperensi Jenewa yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal PBB bulan yang lalu telah memberikan harapan akan adanya langkah-langkah nyata dari pihak-pihak yang berkepentingan ialah Vietnam dan negara-negara maju. Kepada Pemerintah Vietnam, kita sungguh mengharapkan agar secepatnya mengambil langkah yang lebih nyata, seperti yang telah mereka nyatakan dalam Pertemuan Jakarta maupun yang dinyatakan dalam konperensi Jenewa. Tindakan seperti itu sangat diperlukan

demikian terpeliharanya keserasian hubungan antara negara-negara ASEAN dengan Vietnam. Demikian pula kepada negara-negara maju —terutama Amerika Serikat— kita juga mengharapkan agar kesediaan mereka untuk meningkatkan dan mempercepat pemrosesan dan pemukiman pengungsi-pengungsi tersebut dapat secepatnya terlaksana sehingga penyelesaian masalah pengungsi itu secepatnya dapat terlaksana. Kepada Sekjen PBB dalam hal ini Komisaris Tinggi Union Pengungsi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dalam penyelesaian masalah pengungsi serta mengharapkan di hari-hari mendatang ini kerjasama tersebut dapat ditingkatkan lagi.

Demikianlah masalah dan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kerangka internasional maupun regional. Di samping itu kita masih harus menghadapi ketidakpastian perkembangan ekonomi dunia, yang dewasa ini dihantui oleh awan krisis dan resesi. Itu semua harus kita perhitungkan dan kita perkirakan pengaruh dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan REPELITA III.

Mau tidak mau, keadaan di luar Tanah Air kita itu tentu akan mempunyai pengaruh ke dalam diri kita. Karena itu, seperti saya katakan tadi, marilah kita terus memperkuat ketahanan nasional di segala bidang.

Dalam keadaan dunia di sekitar kita yang demikian tadi itulah kita masuki REPELITA III.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Untuk melaksanakan tugas-tugas besar kita di masa datang diperlukan bukan saja pemerintahan yang kuat melainkan terutama pemerintahan yang berwibawa, diperlukan bukan saja kehidupan yang tenang melainkan terutama kehidupan yang segar, diperlukan bukan saja rakyat yang berdisiplin melainkan terutama rakyat yang bergairah. Sebab : kekuatan tanpa kewibawaan akan menakutkan, ketenangan tanpa kesegaran akan membekukan, dan disiplin tanpa kegairahan akan melesukan.

Semua itu memerlukan aparatur pemerintahan, yang selalu merasakan denyutnya hati rakyat, memahami pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya, mengerti harapan dan kesulitan-

an-kesulitannya. Untuk itu segenap aparatur pemerintahan harus memiliki bekal mental dan semangat pengabdian kepada rakyat yang tinggi. Karena itulah —seperti tadi telah saya katakan - segenap pegawai Republik Indonesia dan anggota ABRI sedang mengikuti penataran P4, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Kepada seluruh aparatur pemerintahan saya ingatkan, bahwa dengan penataran itu saja tidak cukup. Penataran itu berhasil bukan diukur dari selesainya seseorang mengikuti penataran, akan tetapi akan dinilai oleh sejarah dan rakyat bagaimana sikap dan tindakan kita sebagai aparatur yang mengabdikan kepada rakyat.

Kita terus mengusahakan perbaikan dan penyempurnaan agar benar-benar terwujud aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang cekatan dan mampu melaksanakan tugasnya, yang dapat mendorong rakyat untuk membangun dan melayani rakyat dengan tulus.

Untuk itu kita lanjutkan langkah yang telah banyak kita lakukan selama ini : baik penyempurnaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan maupun pelaksanaan dan pengawasannya. Di atas kerangka kerja itu terus dilanjutkan perbaikan sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk itu —sekali lagi— pentingnya penataran pegawai negeri yang kini sedang berjalan. Kepada segenap aparatur saya ajak agar di samping menguasai masalah-masalah teknis di bidang masing-masing, kita benar-benar memahami falsafah pembangunan kita seperti yang ditunjukkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Hendaknya diingat baik-baik bahwa pembangunan ini untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Karena itu setiap program yang kita susun, setiap proyek yang kita bangun, malahan setiap pekerjaan kita —betapapun kecilnya pekerjaan itu—, pertama-tama harus kita tujukan untuk peningkatan kemampuan dan taraf hidup rakyat. Bayangkanlah selalu bahwa berjuta-juta rakyat kita masih harus dibantu agar mampu berdiri sendiri, agar terbebas dari keterbelakangan dan kemiskinan. Jauh-

kanlah sikap bahwa kita mengerjakan sesuatu karena ingin dapat imbalan jasa. Buanglah anggapan yang kurang tepat bahwa menjadi pegawai adalah semata-mata untuk mencari penghasilan, apalagi untuk memperoleh keuntungan. Camkanlah baik-baik bahwa pegawai negeri adalah abdi yang harus melayani masyarakat. Lapangan pegawai negeri adalah lapangan pengabdian. Pegawai negeri adalah juga pejoang, bukan saja lapangan mencari nafkah.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari hendaknya selalu diingat bahwa bidang tugas -seorang pegawai adalah merupakan sebagian saja dari lingkup tugas yang lebih besar, ialah untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Karena itu janganlah kita berpikir berkotak-kotak hanya mementingkan lingkungan kerjanya sendiri, atau hanya melihat dari sudut lingkungan kerjanya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dari lingkungan kerja lain atau kepentingan yang luas demi berhasilnya atau terselesaikannya pekerjaan atau proyek secara keseluruhan.

Idealisme pegawai negeri harus tetap kita pupuk, sehingga pegawai negeri dan pejabat negara benar-benar dirasakan sebagai pengayom dan pengabdian masyarakat. Namun saya sadar, bahwa pegawai negeri adalah tetap manusia biasa yang juga menginginkan perbaikan hidup bagi keluarga dan dirinya dalam jaman pembangunan ini. Karena itu Pemerintah selalu berusaha memperbaiki gaji pegawai negeri. Namun kemampuan keuangan negara kita masih terbatas, sehingga sekarang ini misalnya, Pemerintah baru mampu memberi tambahan gaji ke-13. Dan jangan kita lupakan bahwa pengeluaran negara untuk gaji pegawai negeri dan anggota ABRI itu tidak kecil. Jika gaji pegawai negeri kita naikkan tanpa mengingat kebutuhan pembangunan yang lain, maka pembangunan kita akan terhambat.

Namun apabila keuangan negara memang memungkinkan, negara pasti akan memperbaiki lagi penghasilan pegawai. Dan cepat lambatnya perbaikan itu serta besar kecilnya perbaikan itu, antara lain tergantung pada peningkatan prestasi kerja para

pegawai sendiri. Makin tekun dan makin keras kita bekerja, makin besar prestasi kerja kita, makin mampu negara memberikan imbalan jasa yang lebih memadai.

Walaupun gaji pegawai negeri dewasa ini baru pada tingkat "pas-pasan", sama sekali tidak berarti bahwa penyelewengan harus dibiarkan.

Dengan alasan apapun, penyelewengan dan korupsi harus ditindak dan dicegah. Untuk itulah kita melancarkan Operasi Tertib, yang akan kita lanjutkan.

Walaupun kita masih belum puas dengan hasil-hasil yang dicapai oleh Operasi Tertib selama ini, namun hasil-hasilnya dapat dikatakan cukup memadai. Ribuan perbuatan tercela dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur pemerintahan telah dibongkar. Tindakan-tindakan administratif maupun tindakan hukum telah dilakukan. Tanggapan masyarakat terhadap Operasi Tertib ini sangat membesarkan hati, terbukti dari banyaknya surat-surat laporan dan pengaduan yang masuk kepada Operasi Tertib. Terhadap laporan-laporan yang memberikan fakta-fakta dan data-data yang cukup, pasti akan diperhatikan. Dan memang telah banyak yang dijadikan bahan untuk pengecekan masalahnya ataupun bahkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.

Kepada masyarakat, saya sekali lagi ingin menyerukan agar terus berpartisipasi dalam mengusahakan penertiban dan pemberantasan perbuatan-perbuatan penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh aparatur. Marilah kita terus membersihkan tubuh aparatur pemerintahan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini, sekaligus untuk menyelamatkan keseluruhan aparatur pemerintahan yang sebagian terbesar dari pelaksana-pelaksananya tetap bekerja dengan jujur, tertib dan mengabdikan kepada rakyat. Marilah kita tampilkan keanggunan aparatur pemerintahan sebagai pengayom.

Dengan aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan makin

berwibawa, kita pasti akan dapat mencapai kemajuan yang lebih besar dan selangkah maju mendekati cita-cita kita.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

REPELITA II telah kita selesaikan pada akhir Maret yang lalu.

Pembangunan itu telah menyebar ke semua daerah dan kegairahan besar terasa di sana. Daerah yang satu membangun lebih bersemangat dari yang lain, yang satu mencapai hasil yang lebih besar dari yang lain. Untuk terus mendorong agar Daerah lebih bergairah dalam melaksanakan pembangunan, maka seperti halnya pada akhir REPELITA I dahulu—, Pemerintah juga menetapkan Propinsi dan Kabupaten atau Kotamadya yang mencapai hasil karya tertinggi dalam melaksanakan REPELITA II.

Setelah diadakan penelitian dan penilaian yang saksama oleh team yang dibentuk untuk itu, maka pilihan itu jatuh pada Propinsi Jawa Tengah, yang akan menerima tanda penghargaan dari Negara dalam bentuk Parasamya Purnakarya Nugraha.

Dalam pada itu Propinsi Jawa Timur yang dalam REPELITA I dahulu telah terpilih sebagai pencapai hasil yang terbaik dan menerima Parasamya Purnakarya Nugraha, dalam REPELITA II ini telah dapat mempertahankan prestasinya sebagai Propinsi nomor dua terbaik. Sesuai dengan peraturan yang ada, bagi daerah yang setelah menerima Parasamya Purnakarya Nugraha setidaknya dapat mempertahankan prestasinya sebagai nomor dua atau nomor tiga, kepada daerah tersebut diberikan pita prestasi yang bernama Prayojana Kriya Pata. Oleh karena itu kepada Daerah Jawa Timur akan menerima pita prestasi tersebut.

Insya Allah, tanda-tanda penghargaan itu akan saya sampaikan sendiri dalam suatu upacara di Semarang setelah Lebaran nanti. Di samping itu, sebuah Kabupaten atau Kotamadya yang paling berprestasi dalam setiap Propinsi juga akan menerima tanda penghargaan yang serupa.

Kepada semua Daerah yang menerima tanda penghargaan itu saya ucapkan selamat. Lanjutkanlah pembangunan yang benar-benar dapat meningkatkan kemajuan daerah dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kepada Daerah lain yang belum berhasil, saya ajak agar terus berusaha agar nanti dapat mencapai prestasi yang menjadi kebanggaan setiap daerah ini.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Selama Orde Baru ini, selama REPELITA I dan II kita telah berusaha memperkokoh kehidupan politik dan ketatanegaraan, kita telah berusaha memajukan ekonomi dan mensukseskan pembangunan yang makin merata, kita telah berusaha mengembangkan kehidupan sosial budaya kita, kita telah berusaha memantapkan keamanan dan ketertiban, kita telah berusaha menyehatkan aparatur pemerintahan. Marilah kita lanjutkan dan tingkatkan usaha-usaha tersebut.

Seperti saya gambarkan tadi perjalanan kita di tahun-tahun mendatang cukup sulit. Kita dihadapkan pada tantangan-tantangan besar baik dalam Skala nasional, regional maupun internasional.

Namun kita sadar, bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. Dan tidak ada perjuangan tanpa kesulitan.

Kita ingin berbahagia, karena itu kita siap melanjutkan perjuangan dalam pembangunan. Marilah kita lanjutkan perjuangan itu dengan mengatasi segala kesulitan yang menghadang, yang kadang-kadang membelenggu kita.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kekuatan lahir dan batin, memberi kebijaksanaan dan ketabahan kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 1979

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**SOEHARTO**

